

Strategi Komunikasi Divisi Humas Kementerian dalam Negeri dalam Menanggapi Gelombang Demonstrasi Mahasiswa dan Masyarakat pada September 2025

Nazwa Rivie Azahra^{1*}, Hudi Santoso²

^{1,2} Sekolah Vokasi, IPB University, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nazwarivieazahra@apps.ipb.ac.id

Abstract. *The study explores the communication strategy of the Public Relations Division of the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) in responding to the wave of student and community demonstrations in early September 2025. This research aims to identify the strategic approach and challenges faced by the division in managing public communication during a national socio-political crisis. Using a qualitative descriptive method through observation, participation, and in-depth interviews with two informants from the division, the study reveals that Kemendagri's communication strategy emphasized transparency, cross-institutional coordination, and the empowerment of local governments to maintain stability. The division also adopted multi-channel communication, including social media, press releases, and press conferences, ensuring message consistency and public reassurance. However, several challenges were identified, such as the sensitivity of political issues, the spread of misinformation and hoaxes, limited human resources, and the suboptimal implementation of two-way communication. The findings indicate that public communication during a crisis requires accuracy, empathy, and collaboration across institutions. This study implies that strengthening transparency, enhancing crisis communication skills, and improving digital responsiveness are essential for the Ministry's public relations performance in future crises.*

Keywords: *Communication Strategy; Crisis Communication; Ministry of Home Affairs; Public Relations; Public Trust.*

Abstrak. Penelitian ini membahas strategi komunikasi Divisi Humas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam merespons gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada awal September 2025. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pendekatan strategis serta tantangan yang dihadapi divisi tersebut dalam mengelola komunikasi publik selama krisis sosial-politik nasional. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, partisipasi, dan wawancara mendalam terhadap dua informan dari divisi terkait, penelitian ini menemukan bahwa strategi komunikasi Kemendagri berfokus pada transparansi, koordinasi lintas lembaga, dan pemberdayaan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas. Divisi ini juga menerapkan komunikasi multichannel melalui media sosial, siaran pers, dan konferensi pers untuk memastikan konsistensi pesan dan memberikan ketenangan publik. Namun, ditemukan beberapa tantangan seperti sensitivitas isu politik, penyebaran disinformasi dan hoaks, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya penerapan komunikasi dua arah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi publik dalam situasi krisis memerlukan akurasi, empati, dan kolaborasi antar lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan transparansi, peningkatan keterampilan komunikasi krisis, dan respons digital yang cepat merupakan aspek penting bagi peningkatan kinerja humas Kemendagri di masa mendatang.

Kata Kunci: Hubungan Masyarakat; Kementerian Dalam Negeri; Kepercayaan Publik; Komunikasi Krisis; Strategi Komunikasi.

1. PENDAHULUAN

Komunikasi publik pemerintah memiliki peran yang krusial dalam menjaga stabilitas politik, sosial, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara (Siallagan, et al 2025). Dalam konteks demokrasi modern, hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan publik, tetapi juga melalui cara pemerintah menyampaikan informasi, menanggapi isu, dan mengelola dinamika yang berkembang di ruang publik. Divisi Hubungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi salah satu garda

terdepan dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan masyarakat. Fungsi utama humas tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga meredam isu-isu yang berpotensi memicu gejolak sosial, termasuk dalam situasi demonstrasi besar yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat umum. Dalam konteks krisis politik atau sosial, peran humas pemerintah menjadi strategis untuk menciptakan narasi yang menenangkan dan mencegah meningkatnya ketegangan di tengah publik (Rohman, 2023).

Pada awal September 2025, Indonesia dihadapkan pada gelombang demonstrasi besar yang berpuncak pada aksi massa di depan Gedung DPR RI pada 1 September 2025. Aksi tersebut merupakan puncak dari rangkaian demonstrasi nasional yang terjadi pada 25–29 Agustus 2025 dan menyebar ke berbagai daerah. Isu utama yang diangkat adalah “17+8 Tuntutan Rakyat,” termasuk penolakan terhadap tunjangan pejabat, kritik terhadap aparat keamanan, serta tuduhan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat tinggi (Tempo, 2025; Detik, 2025). Kericuhan, penjarahan rumah pejabat, dan bentrokan antara aparat dan massa menandai meningkatnya ketegangan sosial. Jusuf Kalla menilai bahwa aksi tersebut merupakan akumulasi dari ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat (Kompas, 2025). Bagi Divisi Humas Kemendagri, situasi ini menjadi ujian strategis dalam mengelola komunikasi publik agar dapat menenangkan masyarakat, menjaga citra lembaga, dan membangun kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam kondisi krisis seperti ini, strategi komunikasi tidak dapat bersifat reaktif, melainkan harus dirancang secara sistematis dengan mempertimbangkan kerangka komunikasi krisis yang komprehensif (Dewi, dkk 2024).

Strategi komunikasi yang diterapkan harus mencakup penyusunan pesan utama, pemilihan saluran komunikasi yang tepat, penentuan juru bicara yang kredibel, serta koordinasi lintas lembaga agar informasi yang disampaikan konsisten dan efektif (Ilham, 2024). Divisi Humas Kemendagri memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keselarasan pesan antara pusat dan daerah. Ketidakefisienan dalam pengelolaan komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menggerus kepercayaan publik, sedangkan strategi komunikasi yang terarah dapat memperkuat legitimasi pemerintah sekaligus menciptakan dialog yang konstruktif (Qatrunnada & Ridwan, 2022).

Alasan pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada posisi strategis Divisi Humas Kemendagri sebagai pengelola utama komunikasi publik nasional, terutama dalam menghadapi situasi krisis sosial-politik yang berpotensi mengguncang stabilitas negara. Melalui kegiatan magang dan penelitian ini, penulis berupaya menganalisis bagaimana strategi komunikasi dijalankan secara praktis, serta menelaah sejauh mana pendekatan komunikasi dua arah diterapkan dalam menghadapi tekanan opini publik. Adapun Penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Pinandhita dan Prasetyo (2023) menunjukkan bahwa Humas Kementerian Perdagangan menerapkan sembilan strategi komunikasi krisis saat menghadapi kasus kenaikan harga minyak goreng tahun 2022, seperti pembentukan tim komunikasi, konferensi pers berkala, serta kebijakan *one gate communication*. Namun, penelitian tersebut berfokus pada krisis ekonomi yang berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat, berbeda dengan penelitian ini yang menyoroti krisis politik dan sosial yang bersifat dinamis dan emosional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah strategi komunikasi Divisi Humas Kemendagri dalam menanggapi gelombang demonstrasi pada September 2025. Fokus penelitian tidak hanya pada aspek teknis komunikasi, tetapi juga pada pembentukan opini publik, strategi naratif pemerintah, serta penerapan teori komunikasi seperti *Two-Way Symmetrical Communication* dan *Spiral of Silence* dalam praktik komunikasi krisis lembaga pemerintah. Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh gambaran mengenai bagaimana strategi komunikasi publik dapat digunakan untuk menjaga stabilitas sosial, membangun empati publik, serta memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah di tengah situasi krisis nasional.

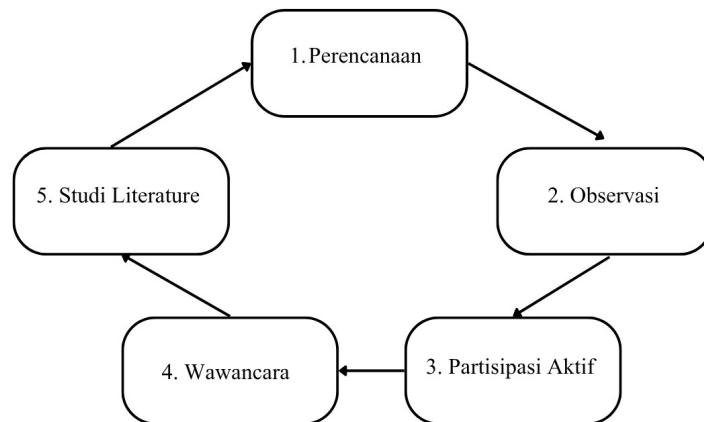
2. METODE

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan secara offline di *Divisi Humas Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia* yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis Divisi Humas Kemendagri sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi publik dan merespons isu-isu nasional, termasuk gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada awal September 2025. Melalui penempatan di lembaga tersebut, penulis memiliki kesempatan untuk mengamati langsung bagaimana pemerintah pusat, melalui fungsi humas, mengelola komunikasi publik dalam situasi krisis. Kegiatan magang berlangsung selama 16 minggu (4 bulan), yaitu sejak 1 September 2025 hingga 20 Januari 2026. Rentang waktu tersebut dipilih agar penulis dapat mengikuti keseluruhan proses kegiatan humas, mulai dari perencanaan strategi komunikasi, pelaksanaan program, hingga tahap evaluasi pasca-demonstrasi.

Sebelum kegiatan magang dimulai, penulis melakukan tahap perencanaan dan pengorganisasian dengan berkoordinasi bersama pembimbing lapangan di Divisi Humas Kemendagri. Tahap ini mencakup penentuan fokus kegiatan magang, pembekalan tentang struktur organisasi, serta pemahaman terhadap sistem kerja humas dalam menyusun dan menyampaikan pesan publik. Melalui tahap ini, penulis memperoleh gambaran awal mengenai fungsi koordinasi lintas bidang, prosedur komunikasi kelembagaan, serta bentuk kolaborasi

antara humas dan media massa. Pengorganisasian dilakukan agar kegiatan magang dapat berjalan sistematis, terarah, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang diangkat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui keterlibatan aktif penulis dalam aktivitas Divisi Humas Kemendagri, seperti membantu penyusunan *press release*, pembuatan konten media sosial, serta pengamatan terhadap pola komunikasi publik selama dan setelah terjadinya demonstrasi September 2025. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti pemberitaan media daring (*BBC Indonesia*, *Detik.com*, *Hukumonline*), jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Penggunaan kedua jenis data ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai strategi komunikasi pemerintah dalam merespons krisis sosial-politik. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Magang Divisi Humas Kemendagri.

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan magang ini meliputi (1) observasi, (2) partisipasi aktif, (3) wawancara, dan (4) studi literatur. Kegiatan dimulai dari tahap awal, yaitu observasi yang dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas Divisi Humas Kemendagri, khususnya dalam menyusun pesan publik, mengelola hubungan dengan media, serta melakukan klarifikasi terhadap isu yang berkembang. Selanjutnya, partisipasi aktif dilakukan melalui keterlibatan penulis dalam kegiatan humas, seperti pembuatan konten publikasi dan pendampingan dalam kegiatan konferensi pers. Wawancara dilaksanakan dengan staf Divisi Humas Kemendagri untuk menggali pandangan mereka mengenai strategi komunikasi yang dijalankan, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas respons komunikasi terhadap isu demonstrasi. Selain itu, studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen, pemberitaan, dan penelitian akademik yang relevan mengenai komunikasi krisis dan

manajemen opini publik. Keempat teknik tersebut diterapkan secara terpadu untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam (Jailani, 2023), sehingga diharapkan mampu menggambarkan secara objektif strategi komunikasi yang dijalankan oleh Divisi Humas Kemendagri dalam menghadapi situasi krisis, serta memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan praktik komunikasi publik pemerintah di Indonesia.

3. HASIL

Kegiatan magang yang dilaksanakan di Divisi Humas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghasilkan sejumlah temuan terkait dinamika pelaksanaan strategi komunikasi publik pemerintah selama terjadinya gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada awal September 2025. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, Humas Kemendagri menjalankan perannya secara aktif sebagai pusat informasi dan koordinasi komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Strategi komunikasi yang diterapkan difokuskan pada tiga hal utama, yaitu menjaga transparansi informasi, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta mendukung peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayahnya masing-masing. Dalam konteks ini, Divisi Humas tidak hanya menyampaikan pesan pemerintah, tetapi juga bertindak sebagai jembatan komunikasi untuk memastikan agar informasi yang beredar di masyarakat tetap akurat, konsisten, dan tidak menimbulkan kepanikan publik.

Proses pelaksanaan strategi komunikasi dilakukan secara bertahap dan sistematis. Pada tahap awal, Humas melakukan analisis situasi serta observasi terhadap isu-isu publik yang muncul selama demonstrasi. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menyusun pesan kunci yang menekankan pentingnya menjaga keamanan daerah, mendorong pemulihan infrastruktur pasca-aksi, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kondusivitas lingkungan. Dalam tahap implementasi, komunikasi publik dijalankan melalui berbagai kanal, baik media konvensional seperti televisi, radio, dan media cetak, maupun media digital seperti situs resmi dan akun media sosial Kemendagri. Humas juga mengadakan konferensi pers dan menerbitkan rilis resmi sebagai bentuk klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang.

Pelaksanaan kegiatan komunikasi publik selama masa krisis ini menunjukkan bentuk adaptasi strategis Humas Kemendagri terhadap dinamika sosial-politik (Nugraha & Novianti, 2022). Melalui pengelolaan komunikasi multichannel, Humas berhasil memastikan bahwa pesan pemerintah tersampaikan secara cepat dan menyeluruh kepada berbagai lapisan masyarakat. Di sisi lain, kegiatan monitoring opini publik dilakukan secara rutin setiap malam

untuk menganalisis persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. Proses ini menunjukkan komitmen lembaga terhadap prinsip keterbukaan informasi dan tanggung jawab publik. Dampak dari strategi komunikasi yang dijalankan juga terlihat dari munculnya perubahan sosial yang positif, terutama dalam hal penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya stabilitas informasi, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menjaga keamanan nasional. Selain itu, praktik komunikasi yang dilakukan mendorong munculnya kesadaran baru di lingkungan birokrasi mengenai pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, upaya ini mencerminkan arah transformasi menuju model komunikasi publik yang lebih partisipatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

4. DISKUSI

Hasil kegiatan magang ini memperlihatkan bahwa strategi komunikasi Divisi Humas Kemendagri dalam menghadapi demonstrasi September 2025 sejalan dengan teori komunikasi krisis dan prinsip *two-way symmetrical communication* yang dikemukakan oleh Grunig dan Hunt (1984), di mana lembaga pemerintah dituntut untuk tidak hanya menyampaikan informasi satu arah, tetapi juga membuka ruang dialog dengan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi dan konsistensi pesan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun komunikasi dua arah belum sepenuhnya optimal, adanya upaya untuk merespons opini publik melalui media sosial dan monitoring isu setiap malam menunjukkan penerapan prinsip komunikasi partisipatif yang semakin berkembang di tubuh birokrasi pemerintah (Manda, 2025).

Temuan lapangan ini juga memperkuat konsep *collaborative governance*, sebagaimana dijelaskan oleh Rahayu, dkk (2025) dalam *Journal Scientific of Mandalika*, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan partisipasi masyarakat dalam penanganan krisis sosial-politik. Strategi komunikasi yang diterapkan Humas Kemendagri memperlihatkan pola kerja kolaboratif antara kementerian, aparat keamanan, dan pemerintah daerah untuk memastikan pesan publik tetap seragam dan terkoordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi publik bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tetapi merupakan hasil sinergi antarinstansi pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas nasional. Tantangan yang dihadapi Divisi Humas selama demonstrasi juga memberikan pelajaran teoretis mengenai pentingnya manajemen isu dan mitigasi informasi dalam situasi krisis. Arus informasi negatif, hoaks, serta penyebaran berita provokatif menuntut adanya mekanisme verifikasi dan klarifikasi yang cepat

dan akurat.

Dalam hal ini, langkah Humas Kemendagri yang menekankan akurasi data dan kehati-hatian dalam penggunaan bahasa publik memperlihatkan kesesuaian dengan teori issue management dari Coombs (2015), di mana keberhasilan komunikasi krisis ditentukan oleh kemampuan lembaga mengendalikan arus informasi sebelum berkembang menjadi krisis reputasi. Adapun strategi komunikasi yang dijalankan oleh Divisi Humas Kemendagri selama demonstrasi September 2025 tidak hanya berperan dalam meredam ketegangan publik, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Pendekatan kolaboratif, konsistensi pesan, serta pemanfaatan media digital menjadi bukti bahwa lembaga humas pemerintah telah bertransformasi menuju model komunikasi yang lebih modern, transparan, dan adaptif terhadap tantangan era informasi. Pengalaman ini menjadi dasar penting bagi pengembangan praktik komunikasi publik pemerintah ke depan, terutama dalam membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka, empatik, dan berbasis data.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian awal dan wawancara yang dilakukan di Divisi Humas Kementerian Dalam Negeri, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang dijalankan dalam menghadapi gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada awal September 2025 berorientasi pada transparansi, kolaborasi, dan penguatan stabilitas publik. Divisi Humas memposisikan dirinya sebagai sumber informasi utama yang menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melalui koordinasi lintas lembaga serta penyusunan pesan yang menenangkan dan empatik, Humas Kemendagri berupaya membangun kepercayaan publik sekaligus meredam potensi eskalasi konflik. Strategi ini dijalankan melalui berbagai kanal komunikasi, baik media sosial, media massa, maupun konferensi pers, dengan menekankan pada konsistensi pesan dan prinsip komunikasi dua arah yang partisipatif.

Namun, dalam pelaksanaannya, Divisi Humas menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Tantangan tersebut mencakup sensitivitas isu politik yang harus disampaikan dengan sangat hati-hati, arus informasi negatif dan hoaks yang perlu dikendalikan melalui verifikasi cepat, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola komunikasi krisis secara menyeluruh. Selain itu, penerapan komunikasi dua arah dengan masyarakat belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan waktu dan kapasitas lembaga. Evaluasi pasca-krisis juga belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga perlu menjadi fokus pengembangan di masa mendatang. Maka dari itu, pengalaman Humas Kemendagri dalam menangani demonstrasi September 2025 menunjukkan pentingnya manajemen komunikasi publik yang

strategis, adaptif, dan kolaboratif. Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak hanya bergantung pada kecepatan informasi, tetapi juga pada kepekaan terhadap aspirasi masyarakat dan kemampuan membangun narasi yang menenangkan. Dengan memperkuat transparansi, memperluas komunikasi dua arah, serta meningkatkan kapasitas SDM, Divisi Humas Kemendagri berpotensi menjadi model humas pemerintah yang profesional dan responsif dalam mengelola isu publik di masa depan.

ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan magang di Divisi Humas Kementerian Dalam Negeri berjalan dengan baik. Terima kasih kepada pihak Divisi Humas Kemendagri yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan selama magang berlangsung. Penulis juga berterima kasih kepada dosen pembimbing dan pembimbing lapangan atas arahan serta dukungannya, serta kepada rekan-rekan dan keluarga atas doa dan motivasinya hingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Apriyani, T. (2021). *Peran sosial media pada gerakan protes massa aksi dan demokrasi baru di era digital (The role of social media in mass protest movements and new democracy in the digital age)*. Kalijaga Journal of Communication, 3(1), 17–30.
- Ardiansyah, A., Risnita, R., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 120–130. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Coombs, W. T. (2015). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Farhan, A. A., Danu, A., Asropi, A., & Rahayu, N. S. (2025). Collaborative governance: Penanganan aksi penyampaian aspirasi masyarakat di DPR RI. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 6(7), 2076–2084. <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla>
- Fithroyatirrizqoh, N. A. Z. (2024). Mengkaji keefektifan gerakan mahasiswa dalam mendorong perubahan kebijakan pemerintah melalui demonstrasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, 491–504.
- Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing public relations*. Holt, Rinehart and Winston.
- Hasiholan, Y., Amanda, S., Tahalea, A., & Novinati, E. (2024). Penciptaan karya fotografi dengan pendekatan fotografi jurnalistik: Demo buruh menolak kenaikan harga BBM. *Jurnal Desain dan Dunia Usaha*, 9(1), 63–80. <https://doi.org/10.25105/jdd.v9i1.19732>
- Ilham, I. (2024). *Strategi komunikasi memperkuat hubungan interpersonal dan public relation* (pp. 176–268). Mutiara Intelektual Indonesia.

- Iriansyah, M. N. (2025). "Demo mahasiswa sudah kelewat batas": Pengaruh pemberitaan media dan persepsi publik terhadap ketahanan sosial-budaya di Kota Makassar. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 8(1), 42–55. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i1.61430>
- Nugraha, A. R., & Novianti, E. (2022). Analisis strategi humas pemerintahan era milenial dalam menghadapi tata kelola informasi publik. *PROfesi Humas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(2), 14–25. <https://doi.org/10.24198/prh.v6i2.37095>
- Nugroho, A. P., Maryam, R., Nisa, A. A., Itsnaini, N., Fuada, K. E., Rini, P. A., Syakila, S., Arrokhman, A., Kiwangi, C. R., Febiyanti, A., Widyadana, Y. F., & Siallagan, J. V. A. (2025). Sosialisasi pencegahan stunting dalam rangka meningkatkan pemahaman ibu hamil di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(4), 2449–2456. <https://dmi-journals.org/jai/>
- Oktariza, S., Rafni, A., Suryanef, S., & Hamdi, I. (2025). Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Negeri Padang sebagai saluran aspirasi politik. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(1), 237–247. <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i1.403>
- Rohman, A. (2023). Sisi positif dan negatif demonstrasi pada negara demokrasi di masa pandemi. *Binamulia Hukum*, 9(2), 153–170. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.370>
- Simamora, I. Y., Miko, M., Resty, R., Anur, A., Tazwa, T., Siska, S., Nadia, N., & Manda, M. (2025). Penerapan konsep komunikasi partisipatif pada pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*, 2(3), 180–191. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.498>
- Siregar, N., Nursyamsi, S. E., & Dewi, N. K. (2024). Analisis strategi komunikasi krisis dalam mempertahankan reputasi perusahaan di situasi darurat. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 2(4), 142–154. <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v2i4.4261>
- Sudarman, S., Hanafi, A., & Amir, A. (2024). Analisis persepsi masyarakat terhadap demonstrasi mahasiswa terkait parkir liar di Kota Makassar. *NineStars Education: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan*, 5(2), 75–82. <https://e-journal.faiuim.ac.id/index.php/ninestar-education>
- Syahrul, J. I. (2020). Dinamika sosial sikap narcisstic aksi demonstrasi mahasiswa dalam prospek demokrasi Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 8(1), 34–41. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v8i1.3012>
- Tempo. (2025, September 1). Fakta-fakta demo 1 September di DPR. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-demo-1-september-di-dpr-2065697>
- Tim detikcom. (2025, September 1). Aksi penjarahan rumah Sahroni hingga Sri Mulyani mulai diselidiki. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-8091648/aksi-penjarahan-rumah-sahroni-hingga-sri-mulyani-mulai-diselidiki>
- Widyananda, E. D., & Pangestika, E. (2024). Penegakan hukum penanganan demo dalam anarkis perspektif HAM. *Journal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), 16992–16999. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.38153>